

# KEPENDUDUKAN INDONESIA

Community Based Analysis on Mangrove Forest Changes in Rembang District, Central Java Province

*Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron, Michiel Damen*

Environmental, Demographic, and Socio-Economic Correlates of Access to Improved Sanitation: Empirical Evidence from Papua and West Papua Provinces

*Sri Irianti, Puguh Prasetyoputra*

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011)

*Ratna Dewi Wuryandari*

Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

*Triyono, Eniarti B. Djohan*

Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global

*Titik Handayani*

Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Reformasi

*Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun, Sri Sunarti Purwaningsih*

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jurnal Kependudukan Indonesia	Vol. 10	No. 1	1-74	Jakarta, Juni 2015	ISSN 1907-2902
-------------------------------	---------	-------	------	--------------------	----------------

**JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA**

Jurnal Kependudukan Indonesia merupakan media informasi, komunikasi, dan pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah kependudukan, ketenagakerjaan dan ekologi manusia. Jurnal ini merupakan *peer-reviewed* jurnal Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Kependudukan-LIPI) yang diterbitkan dua kali dalam setahun. Artikel dapat berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan buku, dan jenis tulisan ilmiah lainnya yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi  
Dewan Redaksi**

Dra. Haning Romdiati, MA (Kepala P2K-LIPI)  
Dra. Titik Handayani, MS  
Dra. Mita Noveria, MA  
Widayatun, SH, MA  
Dra. Ade Latifa, M.Hum  
Zainal Fatoni, MPH  
Vanda Ningrum, MGM  
Syarifah Aini Dalimunthe, M.Sc.  
Andini Desita Ekaputri, MSE  
Intan Adhi Perdana Putri, M.Si  
Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ  
Puji Hartana, S.Sos

**Mitra Bestari**

Prof. Gavin W. Jones, Ph.D., National University of Singapore-Singapore  
Prof. Haruo Kuroyanagi, Sugiyama Jogakuen University-Japan  
Dr. Djoko Hartono, Konsultan World Bank  
Dr. Deny Hidayati, MA., Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Prof. Terence H. Hull, Ph.D., Australian National University- Australia  
Sukamdi, M.Sc., Ph.D., Universitas Gadjah Mada  
Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si., Universitas Indonesia

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha LIPI, lantai X, Ruang 2127  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia  
Tromol Pos 250/JKT 1002,  
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106  
Fax: +62 21 5207205  
*E-mail*: jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id  
*Website*: www.kependudukan.lipi.go.id

**Penerbit**

Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha LIPI, lantai X  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12190-Indonesia  
Telp. +62 21 5207205, 5225711, 5251542 Pes/ext. 2106



Community Based Analysis on Mangrove Forest Changes in Rembang District,  
Central Java Province

*Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron, dan Michiel Damen*

Environmental, Demographic, and Socio-Economic Correlates of Access  
to Improved Sanitation: Empirical Evidence from Papua and West Papua Provinces

*Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra*

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan,  
dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011)

*Ratna Dewi Wuryandari*

Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo  
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

*Triyono dan Eniarti B. Djohan*

Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan  
Tenaga Kerja di Era Global

*Titik Handayani*

Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan  
Sesudah Reformasi

*Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang,  
Widayatun, dan Sri Sunarti Purwaningsih*



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	vii-vii
ABSTRAK/ABSTRACT	ix-xiv
Community Based Analysis on Mangrove Forest Changes in Rembang District, Central Java Province <i>Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron dan Michiel Damen</i>	1-10
Environmental, Demographic, and Socio-Economic Correlates of Access to Improved Sanitation: Empirical Evidence from Papua and West Papua Provinces <i>Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra</i>	11-26
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011) <i>Ratna Dewi Wuryandari</i>	27-42
Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur <i>Triyono dan Eniarti B. Djohan</i>	43-52
Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global <i>Titik Handayani</i>	53-64
Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Reformasi <i>Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun dan Sri Sunarti Purwaningsih</i>	65-74



## KATA PENGANTAR

Isu kependudukan yang dihadapi oleh Indonesia semakin beragam. Dinamika di wilayah pesisir terkait tekanan terhadap lahan, akses terhadap sanitasi yang layak yang belum dirasakan oleh sebagian masyarakat di wilayah timur negeri ini hingga tantangan daya saing penduduk terhadap pasar kerja global. Pada Volume 10, No, 1, Juni 2015 **Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI)** menyetengahkan enam artikel yang membahas sebagian besar isu diatas.

Artikel pertama ditulis oleh Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron, dan Michiel Damen dengan judul Analisis Komunitas Pada Perubahan Hutan Mangrove di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perubahan garis pantai di daerah penelitian, yang menginduksi hutan mangrove yang dinamis. Hutan mangrove yang dinamis mempengaruhi strategi adaptasi lokal, dan itu sesuai dengan intervensi pemerintah dalam program mangrove. Desa Pasarbanggi yang menerima berbagai program, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, dikombinasikan dengan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam membangun mangrove, memiliki peningkatan area mangrove yang stabil dan tanpa mengalami gangguan signifikan dibandingkan dengan Tasikharjo dan Tunggulsari. Sejalan dengan situasi ini, responden memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan hutan mangrove di daerah mereka.

Artikel kedua ditulis oleh Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra menulis Lingkungan, Demografi, Sosio-ekonomi ang Berkorelasi Dengan Akses ke Fasilitas Sanitasi yang Layak: Bukti Empiris dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan, tempat tinggal, jenis dan lokasi sumber air rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, umur dan pendidikan kepala rumah tangga, dan tingkat kekayaan rumah tangga merupakan faktor-faktor yang berkorelasi secara signifikan dengan akses sanitasi layak. Hasil dari analisis memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan lebih penting lagi, dapat dipakai sebagai bahan pembuatan kebijakan terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Artikel ketiga ditulis oleh Ratna Dewi Wuryandari berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Makanan, Pendidikan, dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis data SUSENAS 2011). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel sosio-demografi, sosio-ekonomi dan wilayah tempat tinggal terhadap pengeluaran rumah tangga untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan. Ditinjau dari analisis deskriptif ditemukan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia sebagian besar masih digunakan untuk kebutuhan makanan dengan per bulan adalah Rp.1.332.615 dan rata-rata pengeluaran bukan makanan adalah Rp.1.011.086. Hasil penelitian menemukan rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan adalah Rp. 285.425, kesehatan adalah Rp. 203.600 serta rata-rata proporsi pengeluaran untuk makanan adalah 58 persen. Hasil ini menunjukkan dari sisi ukuran kesejahteraan diketahui secara umum rumah tangga Indonesia cenderung kurang sejahtera. Sementara berdasarkan pengeluaran pendidikan dan kesehatan, rumah tangga Indonesia belum memprioritaskan pengeluarannya untuk investasi modal manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Artikel keempat ditulis oleh Triyono dan Eniarti B.Djohan membahas Pengembangan Wisata Agro: Peluang Kerja Masyarakat di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur, termasuk kepariwisataan, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kawasan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kepariwisataan, khusus wisata agro, belum mampu memberi lapangan kerja secara optimal kepada masyarakat setempat. Permasalahannya adalah: 1) kegiatan pariwisata masih berjalan secara konvensional, 2) sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan belum memadai sehingga kurang memenuhi kebutuhan wisatawan, dan 3) belum adanya dukungan dari berbagai pihak pemangku kepentingan terhadap kegiatan kepariwisataan di Poncokusumo.

Artikel kelima ditulis oleh Titik Handayani menggaris bawahi Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia Dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global. Pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja terdidik dan terampil, tetapi kelebihan pekerja non terampil. Sementara itu, pada saat yang sama antara tahun 2010-2035 Indonesia juga sedang mengalami periode di mana rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah yaitu sebesar 46,9 pada tahun 2028. Hal ini memberikan peluang terjadinya bonus demografi yaitu suatu keuntungan ekonomi yang dapat menyejahterakan penduduk dengan prasyarat diantaranya SDM yang berkualitas dan kesempatan kerja yang layak. Berbagai prediksi dan peluang tersebut akan menjadi tantangan berat karena Indonesia masih dihadapkan pada realitas rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya kesempatan kerja yang layak dan produktif.

Artikel keenam ditulis oleh Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani, Augustina Situmorang, Widayatun dan Sri Sunarti Purwaningsih berjudul Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Reformasi. Hasil kajian LIPI menunjukkan ‘terputusnya’ kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat global dan nasional dengan kebijakan yang sama di tingkat daerah (kabupaten/kota). Prioritas kebijakan pada *stakeholders* terkait juga belum dijalankan secara sinergis. Penerapan kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2000-an berakibat pada bervariasinya komitmen daerah untuk memprioritaskan kesehatan reproduksi. Desentralisasi BKKBN, misalnya, berdampak pada tercerai-berainya nomenklatur kelembagaan di tingkat kabupaten/kota serta tidak berfungsinya lagi ujung tombak petugas lapangan (PLKB). Sementara itu, uji coba implementasi PKRE Terpadu di puskesmas yang berdampak nyata juga menghadapi permasalahan keberlanjutan program yang tidak terjamin. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan perlunya upaya memadukan kembali kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat global, nasional, dan daerah. Jika tidak, perkawinan usia muda, TFR, AKI, serta isu-isu kependudukan strategis lainnya akan semakin terabaikan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penulis yang telah berkontribusi pada terbitan ini juga kepada Mitra Bestari yang sudah bekerjasama dengan redaksi untuk menyampaikan saran dan *reviewnya*. Selamat Membaca!

Salam Hangat,

**Redaksi JKI**




---

*DDC: 577. 307*

*Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron & Michiel Damen*

**ANALISIS KOMUNITAS PADA PERUBAHAN HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH, INDONESIA**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol.10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 1-10*

Hutan mangrove secara luas dikenal sebagai sumber daya berharga yang menyediakan jasa lingkungan, serta fungsinya untuk melindungi kawasan pesisir dari erosi pantai dan mempromosikan sedimentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perubahan dinamis dari hutan mangrove akibat perubahan garis pantai. Penelitian ini menyoroti dua hal, yaitu 1) deteksi garis pantai menggunakan interpretasi visual; 2) pengamatan masyarakat terhadap hutan mangrove serta menganalisis pengaruh perubahan hutan mangrove terhadap masyarakat termasuk aksi adaptasi mereka. Kuesioner semi-terstruktur digunakan sebagai instrumen pengumpulan data melalui survei. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional random sampling untuk menentukan 81 responden dari desa Pasarbanggi, Tasikharjo dan Tunggulsari.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perubahan garis pantai di daerah penelitian, yang menginduksi hutan mangrove yang dinamis. Hutan mangrove yang dinamis mempengaruhi strategi adaptasi lokal, dan itu sesuai dengan intervensi pemerintah dalam program mangrove. Desa Pasarbanggi yang menerima berbagai program, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lainnya, dikombinasikan dengan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam membangun mangrove, memiliki peningkatan area mangrove yang stabil dan tanpa

mengalami gangguan signifikan dibandingkan dengan Tasikharjo dan Tunggulsari. Sejalan dengan situasi ini, responden memiliki respon yang berbeda terhadap perubahan hutan mangrove di daerah mereka. Tanggapan responden terhadap perubahan hutan mangrove berkorelasi dengan partisipasi mereka dalam program bakau dari pemerintah. Responden di Desa Pasarbanggi tampaknya lebih diuntungkan oleh perubahan hutan mangrove termasuk manfaat langsung dan tidak langsung dari hutan, dibandingkan dengan responden lain di Tasikharjo dan Tunggulsari .

**Kata Kunci:** Perubahan Hutan Mangrove, Perubahan Garis Pantai, Persepsi Masyarakat, Penyesuaian Masyarakat

---

*DDC: 360,613.644*

*Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra*

**LINGKUNGAN, DEMOGRAFI, SOSIO-EKONOMI YANG BERKORELASI DENGAN AKSES KE FASILITAS SANITASI YANG LAYAK: BUKTI EMPIRIS DARI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 11-26*

Provinsi Papua dan Papua Barat adalah dua di antara provinsi-provinsi di Indonesia yang masih kekurangan akses terhadap sanitasi yang layak. Oleh karena itu tulisan ini menyajikan hasil analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan akses sanitasi meliputi lingkungan, demografi dan sosio-ekonomi di kedua provinsi tersebut. Data dari Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2011 dipakai untuk menentukan faktor-faktor lingkungan, demografi dan sosio-ekonomi yang berkorelasi dengan akses ke fasilitas sanitasi yang layak pada tingkat rumah tangga. Model-model regresi probit diaplikasikan pada data tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa kecamatan, tempat tinggal, jenis dan lokasi sumber air rumah tangga, jumlah anggota



rumah tangga, umur dan pendidikan kepala rumah tangga, dan tingkat kekayaan rumah tangga merupakan faktor-faktor yang berkorelasi secara signifikan dengan akses sanitasi layak. Hasil dari analisis memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan lebih penting lagi, dapat dipakai sebagai bahan pembuatan kebijakan terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

**Kata Kunci:** Sanitasi Dasar, MICS, Regresi Probit, Efek Marginal, Disparitas

---

*DDC: 304.640*

*Ratna Dewi Wuryandari*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEM-PENGARUHI PENGELUARAN MAKANAN, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN RUMAH TANGGA INDONESIA (Analisis Data Susenas 2011)**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 27-42*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel sosio-demografi, sosio-ekonomi dan wilayah tempat tinggal terhadap pengeluaran rumah tangga untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan. Analisis regresi menunjukkan tahapan siklus hidup rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dan daerah tempat tinggal berpengaruh secara konsisten terhadap proporsi pengeluaran makanan, total pengeluaran pendidikan, dan total pengeluaran kesehatan. Semakin banyak jumlah ART meningkatkan proporsi pengeluaran makanan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Rumah tangga anak dan rumah tangga tiga generasi berpengaruh paling besar terhadap masing-masing untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Sementara rumah tangga di perkotaan memiliki pengaruh paling besar terhadap proporsi pengeluaran makanan, pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Ditemukan pula bahwa rumah tangga yang memiliki proporsi pengeluaran makanan terbesar tetapi pengeluaran pendidikan dan kesehatannya terkecil adalah rumah tangga yang KRTnya bekerja sebagai pekerja mandiri.

**Kata Kunci:** Pengeluaran Pangan, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan, Tahapan Siklus Hidup Rumah Tangga

---

*DDC: 333.711.*

*Triyono dan Eniarti B. Djohan*

**PENGEMBANGAN WISATA AGRO: PELUANG KERJA MASYARAKAT DI KAWASAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 43-52*

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan wisata agro di kawasan perdesaan dalam kaitannya dengan peluang kerja bagi masyarakat desa disekitarnya. Kajian ini menggunakan pendekatan social budaya dengan memperhatikan beberapa unsur pendukung kegiatan kepariwisataan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian pada Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan pada tahun 2011. Desa ini sedang dikembangkan sebagai salah satu Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur, termasuk kepariwisataan, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kawasan tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, pengamatan dan kajian pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kepariwisataan, khusus wisata agro, belum mampu memberi lapangan kerja secara optimal kepada masyarakat setempat. Permasalahannya adalah: 1) kegiatan pariwisata masih berjalan secara konvensional, 2) sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan kepariwisataan belum memadai sehingga kurang memenuhi kebutuhan wisatawan, dan 3) belum adanya dukungan dari berbagai pihak pemangku kepentingan terhadap kegiatan kepariwisataan di Poncokusumo.

**Kata Kunci:** Kepariwisataan, Ketenagakerjaan, Desa Poncokusumo, Kawasan Agropolitan

---

*DDC: 107.378*

*Titik Handayani*

**RELEVANSI LULUSAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI ERA GLOBAL**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 53-64*

Pasar kerja global yang ditandai dengan terintegrasinya tenaga kerja antar negara juga disertai dengan munculnya ragam - jenis pekerjaan baru seiring dengan inovasi sains-teknologi maupun meningkatnya kreativitas untuk menjawab kompetisi yang semakin ketat. Untuk itu pendidikan tinggi semakin dituntut

mampu merespon kebutuhan dunia kerja yang lebih dinamis dan kompleks. Tulisan ini bertujuan mengkaji relevansi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dan kebutuhan tenaga kerja di era global. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder dari berbagai sumber seperti Dirjen Pendidikan Tinggi-Kemendiknas, BPS, ILO dan Bank Dunia serta berbagai hasil kajian yang relevan.

Berdasarkan data makro menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat kecenderungan banyak dibuka Perguruan Tinggi (PT) baru secara massif dan lebih berorientasi profit tanpa diikuti dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas, sehingga menghasilkan jumlah lulusan yang terus meningkat. Di sisi lain, kesempatan kerja produktif di Indonesia juga terbatas, sehingga penganggur terdidik relatif tinggi. Persoalan lain, prediksi McKinsey Global Institute (MGI) menunjukkan bahwa dalam pasar kerja global, pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja terdidik dan terampil, tetapi kelebihan tenaga kerja non terampil. Adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan juga didukung data ILO (2015) tentang tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan ketrampilan yang proporsinya mencapai lebih dari separuhnya. Adanya permasalahan tersebut semakin mendesak untuk diatasi sejalan dengan pemerlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN maupun berbagai kesepakatan regional lain di tingkat global, karena kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil akan diisi oleh tenaga kerja asing. Dengan demikian kerjasama dan sinergi perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri baik di tingkat nasional maupun internasional perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci :** Relevansi, Perguruan Tinggi, Tenaga Kerja, Pasar Kerja Global.

---

**DDC: 321.613**

**Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani,  
Augustina Situmorang, Widayatun, dan Sri Sunarti  
Purwaningsih**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN  
REPRODUKSI DI INDONESIA: SEBELUM DAN  
SESUDAH REFORMASI**

***Jurnal Kependudukan Indonesia***

***Vol. 10, No. 1, Juni 2015, Hlm. 65-74***

Kebijakan kesehatan reproduksi merupakan salah satu determinan penting pencapaian tujuan pembangunan kependudukan dan kesehatan di Indonesia. Angka Kematian Ibu (AKI), perkawinan usia dini, dan angka fertilitas total (Total Fertility Rate atau TFR) merupakan sebagian indikator yang menunjukkan pentingnya peran kebijakan kesehatan reproduksi tersebut. Tulisan ini mengkaji perjalanan implementasi kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia serta implikasinya terhadap perkawinan usia muda, TFR, dan AKI. Data dan informasi yang digunakan dalam tulisan ini terutama berdasarkan hasil review terhadap berbagai studi yang dilakukan tim peneliti Pusat Penelitian (P2) Kependudukan LIPI. Hasil kajian P2 Kependudukan LIPI termasuk: kebijakan kesehatan reproduksi dan otonomi daerah (2000-2005), desentralisasi BKKBN (2005), HIV/AIDS di wilayah perbatasan (2006-2009), serta implementasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial Terpadu (PKRE Terpadu) di puskesmas (2007). Selain itu, metode desk review dilakukan untuk mempertajam analisis hasil studi P2 Kependudukan LIPI dalam konteks kekinian.

Hasil kajian P2 Kependudukan LIPI menunjukkan 'terputusnya' kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat global dan nasional dengan kebijakan yang sama di tingkat daerah (kabupaten/kota). Pelayanan kesehatan reproduksi belum dipahami secara integral, masih dianggap 'identik' dengan kesehatan reproduksi remaja. Prioritas kebijakan pada stakeholders terkait juga belum dijalankan secara sinergis. Penerapan kebijakan otonomi daerah pada awal tahun 2000-an berakibat pada bervariasinya komitmen daerah untuk memprioritaskan kesehatan reproduksi. Desentralisasi BKKBN, misalnya, berdampak pada tercerai-berainya nomenklatur kelembagaan di tingkat kabupaten/kota serta tidak berfungsinya lagi ujung tombak petugas lapangan (PLKB). Sementara itu, uji coba implementasi PKRE Terpadu di puskesmas yang berdampak nyata juga menghadapi permasalahan keberlanjutan program yang tidak terjamin. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan perlunya upaya memadukan kembali kebijakan kesehatan reproduksi di tingkat global, nasional, dan daerah. Jika tidak, perkawinan usia muda, TFR, AKI, serta isu-isu kependudukan strategis lainnya akan semakin terabaikan.

**Kata Kunci:** Dinamika Penduduk, Kesehatan Reproduksi, Kebijakan, Otonomi Daerah





Vol. 10, No. 1, Juni 2015

*DDC: 577.307**Mochamad Budi Purnomo, Dyah R. Hizbaron dan Michiel Damen***COMMUNITY-BASED ANALYSIS ON MANGROVE FOREST CHANGES IN REMBANG DISTRICT, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA***Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 1-10*

Mangrove forest is widely known as valuable resources, which provide goods and services as well as its function to protect coastal area from coastal erosion and promote sedimentation. This study aims to investigate community perspective towards dynamic change of mangrove forest due to coastline change. The research highlights two observations, i.e 1) coastline detection using visual interpretation; 2) community observation towards mangrove forest. Semi-structured questionnaire was applied to analyze the influence of mangrove forest changes to community as well as their adjustment. A proportional random sampling protocol was performed to determine 81 respondents from the village of Pasarbanggi, Tasikharjo and Tunggulsari. The research reveals that the research area exposes to coastline change, which induces mangrove forest dynamic. The dynamic mangrove forest influences local adaptation strategies, and it corresponds to government intervention within mangroves program. Pasarbanggi Village, which received various programs, both from government and other parties, combined with active participation of local people in establishing mangrove, has a stable increase of mangroves area between periods without significant disturbances compared to Tasikharjo Village and Tunggulsari Village. In line with this situation, respondents have different response toward the changes of mangrove forest in their area. Respondents' response toward mangrove forest changes correlates to their participation in government mangroves program.

Respondents in Pasarbanggi Village are apparently more benefited by the changes of mangroves forest including the direct and indirect benefit from the forest, as well as from mangroves program, compared to another respondent in Tasikharjo Village and Tunggulsari Village.

**Keywords:** Mangrove Forest Changes, Coastline Changes, Community's Perception, Community's Adjustment

*DDC: 360,613.644**Sri Irianti dan Puguh Prasetyoputra***ENVIRONMENTAL, DEMOGRAPHIC, AND SOCIO-ECONOMIC CORRELATES OF ACCESS TO IMPROVED SANITATION: EMPIRICAL EVIDENCE FROM PAPUA AND WEST PAPUA PROVINCES***Jurnal Kependudukan Indonesia**Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 11-26*

Papua and West Papua provinces are two of many lagging provinces in Indonesia in terms of access to adequate sanitation. Hence, this paper aims to reveal determinants of access to improved sanitation by investigating the environmental, demographic, and socio-economic correlation in both provinces. Data from the 2011 Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) were used to determine the demographic and socio-economic correlates of households' access to improved sanitation facilities. Probit regression models were fitted to the data. The results suggest that district, place or residence, type and location of household water source, household size, age of household head, education of household head, and household wealth have significant correlation with access to improved sanitation. These corroborate previous findings and more importantly, it can be used to inform policy makers in Indonesia especially in Papua and West Papua Provinces.

**Keywords:** Basic Sanitation, MICS, Probit Regression, Marginal Effect, Inequality

---

**DDC:** 304.640

**Ratna Dewi Wuryandari**

**DETERMINANTS OF HOUSEHOLD EXPENDITURES ON FOOD, EDUCATION AND HEALTH IN INDONESIA USING THE 2011 SUSENAS DATA**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 27-42*

The objective of this study is to analyze the effect of socio-demographic and socio-economic variables and location of residence on household expenditures for food, education, and health. Regression analysis shows that household life cycle stages, household size and residential areas have consistent effect on the proportion of food expenditure, education expenditure and health expenditure. Larger household size increases proportion of food expenditure, education expenditure and health expenditure. Stages child household and third generation household have the highest influence on education expenditure and health expenditure. Meanwhile, urban household has the largest impact on the proportion of food expenditure, education expenditure and health expenditure. It is also found that households with the highest proportion of food expenditure and with the smallest expenditures on education and health are the ones who have heads of household who are working as free labors or family workers.

**Keywords:** Food Expenditure, Education Expenditure, Health Expenditure, Household Life Cycle Stages

---

**DDC:** 333.711.

**Triyono and Eniarti B. Djohan**

**AGRO TOURISM DEVELOPMENT: EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN THE REGION PONCOKUSUMO, MALANG REGENCY, EAST JAVA**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 43-52*

This article aims to describe and assess the existence of agro-tourism in rural areas with regards to employment

opportunities for local villagers around the area. This study used a socio culture approach by observing the supporting elements of tourism activities. This article derived from a research in Poncokusumo village, Malang District, of East Java Province, done in 2011. This village is currently developed as one of the Agropolitan Region in East Java Province including tourism, which expected to create job opportunities for people living around the area. This study used qualitative methods in the form of indepth interviews, observation and literature review.

This study indicated that tourism, in particular agro tourism, has not been able to optimally provide employment opportunities for the local community. The problems, among others, were: 1) tourism activities are still run under conventional practices, 2) facilities and infrastructure needed to support tourism activities are inadequate, and 3) the absence of support from various stakeholders regarding tourism activity in Poncokusumo

**Keywords:** Tourism, Employment, Poncokusumo Village, Agropolitan Region

---

**DDC:** 107.378

**Titik Handayani**

**THE RELEVANCE OF GRADUATES OF HIGHER EDUCATION IN INDONESIA WITH THE REQUIREMENTS OF LABOR IN THE GLOBAL ERA**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 53-64*

Global labor market which marked by the integration of labor between countries is also accompanied by the emergence of variety kind of new job along with the science-technology innovation and also creativity improvement to answer the increasingly fierce competition. Therefore, the higher education are demanded more to be able to respond the workforce needs that more dynamic and complex. Based on those issues, this paper will examine the relevance of university graduates in Indonesia and labor requirement in the global era. The used approach is a quantitative approach using secondary data from various sources such as the Directorate General of Higher Education of the Ministry of Education, the Central Bureau of Statistics, ILO and the World Bank and several studies are relevant.

Based on the macro data, it shows that Indonesia currently has a tendency in opened the new Higher Education (PT) massively and more profit oriented without being followed by the provision of adequate infrastructure and quality, and then resulting the increasing number of graduates. On the other hand, productive employment in Indonesia is also limited, so that the educated unemployed are relatively high. Another problem, McKinsey Global Institute (MGI) predicts that in the global labor market, in 2030 Indonesia is expected to experience a labor shortage of educated and skilled, but has excess in non-skilled labor. The gap between supply and demand in educated and skilled labor also supported by the ILO data (2015) about the labor who does not fulfill the education and skills qualification, which the proportion is more than half. Those issues are getting urgent to be solved, along with the implementation of ASEAN Economic Community and other regional agreement globally. This is because the lack of workforce will be immediately filled by foreign workers. Therefore, the cooperation and synergy between Higher Education (PT) and the world of business and industry, both national and international, need to be improved.

**Keywords:** Relevance, Universities, Labor, Global Labor Market

---

*DDC: 321.613*

*Zainal Fatoni, Yuly Astuti, Sari Seftiani,  
Augustina Situmorang, Widayatun dan Sri Sunarti  
Purwaningsih*

## **IMPLEMENTATION OF REPRODUCTIVE HEALTH POLICY IN INDONESIA: BEFORE AND AFTER THE REFORM ERA**

*Jurnal Kependudukan Indonesia*

*Vol. 10, No. 1, June 2015, Page 65-74*

Policy on reproductive health is one of the essential determinant to address the goals of population and health development in Indonesia. Maternal Mortality Ratio (MMR), teenage marriage, and Total Fertility Rate (TFR) are among the indicators that show the important role of reproductive health policy. This article discusses the progress of reproductive health policy implementation in Indonesia and its implication to early marriage, TFR, and MMR. Data used in this paper are mainly derived through desk studies from previous research conducted by the Research Center for Population – Indonesian Institute of Sciences. The studies consist of reproductive health policy and

regional autonomy (2000-2005), BKKBN's decentralization (2005), HIV/AIDS in border areas (2006-2009), and the implementation of integrated reproductive health services in primary health care (2007). Desk reviews are also used to analyze current studies from LIPI that are related to these issues.

LIPI's studies showed that there is a gap between the implementation of reproductive health policy at the global and national level with the district level. The implementation of reproductive health services are not yet integrated as it is less popular than adolescent reproductive health policy. Policy priorities for relevant stakeholders have not been implemented synergically. The implementation of decentralization policy in early 2000's created various commitments from the local government in prioritizing reproductive health programs. BKKBN's decentralization, for example, has affected not only the structure of its institution at district level, but also the function of the family planning facilitator at village level. Meanwhile, pilot project implementation on the integrated essential reproductive health services in primary health cares that has significant contribution also faced uncertainty in terms of its continuation. Hence, this article suggests the importance of synergizing reproductive health policy at the global, national, and district level to meet the appropriate situation and needs at the local context. Otherwise, teenage marriage, TFR, and MMR as well as other population issues will be further overlooked.

**Keywords:** Population Dynamics, Reproductive Health, Policy, Regional Autonomy

